



2022

Renja

Dinas Perikanan dan Peternakan

Renja Dinkannak 2022

m swordcoverpages

Jl. Gatot Soebroto No.108 Purwokerto

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINKANNAK TAHUN LALU.....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinkannak Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinkannak.....	9
2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah.....	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinkannak.....	23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN.....	39
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinkannak.....	41
3.3. Program dan Kegiatan.....	42

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 51

BAB V PENUTUP 59

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel T-C29	Rekapitulasi evaluasi renja dan Pencapaian Renstra s/d tahun 2021 Dinas Perikanan dan Peternakan	11
Tabel T-C30	Target Indikaor Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Tahun sebelumnya	23
Tabel T-C31	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023 Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Banyumas	31
Tabel T-C 32	Usulan Pemangku Kepentingan Tahun 2022	
Tabel T-C 33	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023 Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Banyumas	44
Tabel T-C 34	Matrik Tahun 2022 berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Kabupaten Banyumas	53

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi

Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Tahun 2022. Renja merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD; RPJMD ; Renstra SKPD; RKPD; dan RENJA SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu :

” Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri”

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Misi yang terkait dan menjadi focus kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas yaitu:

Misi 3 : ***Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.***

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas

Tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal-Pemalang;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 adalah:

1. Menentukan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2022 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagai pedoman Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas selama tahun 2022.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,

berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan , maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah. Jadi indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,

berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional. Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang startegis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD,

menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan serta penjelasan proses tersebut dilakukan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,

dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun

berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, menguraikan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat dalam matrik renja Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINKANNAK TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKANNAK TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINKANNAK

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. *Penetapan Indikator Kinerja*

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan

besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan target kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2020 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020. Jumlah anggaran belanja pada APBD Induk Tahun 2020 sebesar Rp 18.227.690.593,00 terdiri dari belanja tidak langsung Rp 10.399.943.593,00 dan belanja langsung Rp 7.827.747.000,00. Dalam pelaksanaannya terjadi refocusing anggaran dampak pandemi covid 19 menjadi Rp 15.925.177.673,00 dengan belanja tidak langsung Rp 9.884.756.621,00 dan belanja langsung Rp 5.740.421.052,00. Penyerapan anggaran belanja langsung Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 5.144.273.932,00 (89,61%) dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.740.421.052,00.

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2020 telah melaksanakan seluruh program yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu terdiri dari 13 program dan 31 kegiatan. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja. Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja tahun lalu dapat dilihat dalam table T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021
Dinas Perikanan dan Peternakan**

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan Produksi Perikanan dan Peternakan								0		
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	7,50	4,53	1,5	2,70	180,0	0	7,23	96,4
		Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	15,00	6,41	3	4,99	166,3	0	11,4	76,0
		Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	%	10	2,74	2	5,7	285,0	0	8,44	84,4
		Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Peternakan	%	10	6,98	2	2	100,0	0	8,98	89,8
	Peningkatan Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	7,5	5,05	1,5	1,52	101,3	0	6,57	87,6
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	7,5	3,56	1,5	2,63	175,3	0	6,19	82,5
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	53597	10767,407	10559	10931,44	103,5	0	21698,85	40,5

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase Kelompok Budidaya bersertifikat	%	20	20	20	20	100,0	0	40	200,0
		Peningkatan jumlah kelompok yang naik kelas	Kelompok	50	10	10	10	100,0	0	20	40,0
	Pengembangan Perikanan Budidaya	persentase pokdakan bersertifikat	%	50	10	10	10	100,0	0	20	40,0
		Demplot teknologi budidaya ikan	Paket	10	2	0	0	-	0	2	20,0
	Pengembangan Sarpras dan kawasan Perikanan	jumlah kelompok terfasilitasi sarana prasarana	Kelompok	5	2	0	0	-	0	2	40,0
	Penyidikan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ikan	Prosentase kejadian penyakit terlapor yang tertangani	%	70	100	70	100	142,9	0	200	285,7
	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pokok Unit Pembenihan (UPTD Kabupaten)	Kolam, Hatchery dan Showroom Fish dalam keadaan baik	Lokasi	2	4	2	2	100,0	0	6	300,0
	Pengadaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Jumlah Demplot Budidaya Ikan	Paket	13	2	10	10	100,0	0	12	92,3
	Program Penyediaan Benih Ikan Air Tawar	Persentase peningkatan produksi benih ikan	%	10	10	10	17	170,0	0	27	270,0
		Produksi calon induk gurame	Ekor	2000	445	400	400	100,0	0	845	42,3
	Operasional UPT Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar	Produksi calon induk	Ekor	2000	445	400	400	100,0	0	845	42,3

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		produksi benih ikan	Ekor	30243500	5962900	5865000	5627332	95,9	0	11590232	38,3
	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	4560	902,845	898	926,55	103,2	0	1829,395	40,1
		Jumlah Perairan Umum Yang Ter Re Stocking Ikan	Lokasi	100	20	20	20	100,0	0	40	40,0
	Pengembangan Perikanan Perairan Umum	- Jumlah Ikan yang di tebar di perairan umum	Ekor	1000000	210000	25000	275000	1.100,0	0	485000	48,5
		Jumlah lokasi perairan umum yang terestocking	Lokasi	100	24	3	20	666,7	0	44	44,0
	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Persentase realisasi keuangan program	%	100	92,55	100	89,61	89,6	0	182,16	182,2
		Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100	96,79	96,8	0	196,79	196,8
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Jasa publikasi yang dibayar	%	100	300	100	200	200,0	0	500	500,0
		Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	Bulan	12	12	12	12	100,0	0	24	200,0
		Pembayaran Pajak, PBB dan Pajak kendaraan yang dibayar	Tahun	1	1	1	1	100,0	0	2	200,0
	Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah	Alat Tulis Kantor yang tersedia	Tahun	1	1	1	1	100,0	0	2	200,0

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2020	Tingkat Realisasi %	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2021 (Renstra Perubahan	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		bahan perlengkapan kerja tersedia	Tahun	1	1	1	100,0	0	2	200,0
		perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	Tahun	1	1	1	100,0	0	2	200,0
		alat listrik dan elektronik yang tersedia	Tahun	1	1	1	100,0	0	2	200,0
		cetak dan penggandaan yang tersedia	Tahun	1	1	1	100,0	0	2	200,0
		Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia	Tahun	1	1	1	100,0	0	2	200,0
	Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Orang	35	30	35	97,1	0	64	182,9
	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah	Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	60	12	1	100,0	0	13	21,7
		Perjalanan dinas untuk rapat, Koordinasi dan konsultasi	Bulan	60	12	12	100,0	0	24	40,0
		Kegiatan Monitoring evaluasi Kepegawaian dan Keuangan yang dilaksanakan	Kali	60	12	1	100,0	0	13	21,7
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	Jenis	5	5	5	100,0	0	10	200,0

	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Jenis	5	5	5	5	100,0	0	10	200,0
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah	gedung pemerintah dalam kondisi baik	Unit	16	16	16	16	100,0	0	32	200,0
	Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah	kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	Unit	70	70	70	70	100,0	0	140	200,0
		kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	Unit	8	8	8	8	100,0	0	16	200,0
		Kendaraan bermotor non roda 2 dan roda 4	Unit	23	4	4	8	200,0	0	12	52,2
	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	Orang	50	0	50	50	100,0	0	50	100,0
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100,0	0	200	200,0
		Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100	100	100,0	0	200	200,0
	Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	8	8	8	8	100,0	0	16	200,0
	Pemutakhiran data dan Pelayanan Informasi Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan pelayanan informasi perencanaan yang dilaksanakan	Buku	1	1	1	1	100,0	0	2	200,0
	Peningkatan Produksi Peternakan	Produksi Daging	Ton	115241	22405,31	22357	23429,99	104,8	0	45835,3	39,8
		Produksi Telur	Ton	91361	17917,323	17724	18309,74	103,3	0	36227,06	39,7

		Produksi Susu	Liter	19897000	3761563	3860000	4015464	104,0	0	7777027	39,1
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi Sapi Potong	Ekor	16636	14661	15224	15253	100,2	0	29914	179,8
		Populasi Sapi Perah	Ekor	2642	2287	2418	2427	100,4	0	4714	178,4
		Populasi Kambing	Ekor	192092	166101	175734	175835	100,1	0	341936	178,0
		Populasi Domba	Ekor	17609	17097	16115	17269	107,2	0	34366	195,2
		Populasi Ayam Buras	Ekor	1221805	1701354	1118125	1189202	106,4	0	2890556	236,6
		Populasi ayam Pedaging	Ekor	9515322	3223287	8707867	11706500	134,4	0	14929787	156,9
		Populasi Ayam Petelur	Ekor	1618759	1399852	1481394	1483844	100,2	0	2883696	178,1
		Populasi Itik	Ekor	164688	145135	150713	150940	100,2	0	296075	179,8
	Pembinaan dan Pengembangan Peternakan	Persentase Kelompok ternak terlatih menerapkan hasil pelatihan yang dianjurkan	%	70	70	70	70	100,0	0	140	200,0
		service of conception	Angka	1,5	1,8	1,7	1,7	100,0	0	3,5	233,3
		Kelompok terfasilitasi	Kelompok	5	2	1	1	100,0	0	3	60,0
	Pembangunan Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak	instalasi perbibitan dan hijauan pakan ternak yang terbangun	Unit	1	1	1	2	200,0	0	3	300,0
	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Produksi Peternakan	Prosentase kelompok yang terbina dalam kawasan	%	100	20	20	20	100,0	0	40	40,0
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase penurunan Angka kesakitan Ternak Besar	%	0,1	0,1	0,1	0,1	100,0	0	0,2	200,0
		Persentase penurunan Angka kesakitan ternak Kambing dan Domba	%	0,1	0,1	0,1	0,1	100,0	0	0,2	200,0
		Persentase penurunan Angka kesakitan ternak ayam	%	0,1	0,1	0,1	0,1	100,0	0	0,2	200,0
		Persentase penurunan Angka kematian ternak Ternak Besar	%	0,03	0,03	0,03	0,03	100,0	0	0,06	200,0

		Persentase penurunan Angka kematian ternak Kambing dan Domba	%	0,01	0,01	0,01	0,01	100,0	0	0,02	200,0
		Persentase penurunan Angka kematian ternak ayam	%	0,02	0,05	0,05	0,05	100,0	0	0,1	500,0
	Penyidikan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak dan Kesehatan Veteriner	Jumlah ternak Pengobatan Masal	Ekor	3000	600	200	200	100,0	0	800	26,7
		Jenis sampel pemeriksaan	Jenis	3	3	2	2	100,0	0	5	166,7
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase kelompok ternak terlatih yang menerapkan teknologi	%	50	10	10	10	100,0	0	20	40,0
	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna	Prosentase Kelompok yang menerapkan hasil pelatihan	%	40	40	40	40	100,0	0	80	200,0
	Prpgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Pelayanan Kesehatan Hewan	Nilai	80	76,84	77	77,31	100,4	0	154,15	192,7
	Operasional UPT Puskesmas	Prosentase pelayanan kesehatan ternak 100 %	%	100	100	100	10	10,0	0	110	110,0
	Program Penyediaan Daging Ternak ASUH	Persentase pengawasan pemotongan ternak di RPH	%	100	100	100	100	100,0	0	200	200,0
	Operasional UPT Rumah Potong Hewan	Jumlah Daging Sapi ASUH	Ton	8250	1002	1000	720,73	72,1	0	1722,73	20,9
		Jumlah Daging Kambing ASUH	Ton	560	119	100	97,86	97,9	0	216,86	38,7
	Program Pengembangan Bibit Ternak dan HPT	Persentase kenaikan ketersediaan bibit hijauan pakan ternak yang unggul	%	100	100	100	100	100,0	0	200	200,0
		Persentase kenaikan ketersediaan bibit sapi perah	%	100	200	100	50	50,0	0	250	250,0
	Operasional UPT Perbibitan Ternak dan HPT	Luas penanaman Hijauan Pakan ternak	Ha	15	3	3	3	100,0	0	6	40,0
		jumlah calon bibit ternak sapi perah	Ekor	39	6	6	3	50,0	0	9	23,1
	Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	%	10	2,74	2	5,7	285,0	0	8,44	84,4

	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Persentase kelompok pengolah dan pemasaran Poklhasar hasil perikanan yang terbina	%	100	20	20	20	100,0	0	40	40,0
		Persentase Kelompok Usaha Perikanan bersertifikat	%	20	20	20	20	100,0	0	40	200,0
		Peningkatan angka konsumsi ikan	Kg	0,50	0,1	0,1	0,1	100,0	0	0,2	40,0
		Produksi olahan hasil perikanan	Ton	903,4	178,353	177,1	188,5	106,4	0	366,853	40,6
	Pengembangan Minabisnis Perikanan	prosentase kelompok usaha perikanan berijin	%	10	10	10	0	-	0	10	100,0
		prosentase kelompok menerapkan hasil pelatihan	%	10	10	10	0	-	0	10	100,0
	Peningkatan Daya Saing Hasil Produksi Perikanan	Prosentase kelompok yang menerapkan hasil pelatihan	%	10	10	10	10	100,0	0	20	200,0
		keikutsertaan kegiatan promosi	Kali	10	2	0	2	-	0	4	40,0
	Peningkatan Gemarikan	Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	14,83	14,5	14,42	21,05	146,0	0	35,55	239,7
		Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi gemarikan	Kali	8	2	2	2	100,0	0	4	50,0
	Peningkatan Produksi Olahan Hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Peternakan	%	10	6,98	2	2	100,0	0	8,98	89,8
	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Peternakan	Persentase kelompok pengolah dan pemasaran (Poklhasar) hasil peternakan yang terlatih	%	16	16	16	16	100,0	0	32	200,0
		Persentase kelompok usaha peternakan berijin	%	10	10	10	10	100,0	0	20	200,0
		Produksi olahan hasil peternakan	Ton	2654,06	534,91	520,21	545,61	104,9	0	1080,52	40,7
	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Prosentase usaha peternakan dan hasil olahan peternakan yang berijin	%	20	20	20	20	100,0	0	40	200,0
		Persentase Peningkatan kemampuan kelas kelompok ternak	%	20	20	20	20	100,0	0	40	200,0

	Pengembangan pengolahan dan pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Persentase poklhasr yang menerapkan hasil pelatihan	%	20	20	20	20	100,0	0	40	200,0
		keikutsertaan kegiatan promosi	Kali	10	2	0	2	-	0	4	40,0

Purwokerto, 2021
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Ir. SULISTIONO, M.Si
NIP. 19680228 199403 1 004

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan , pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perikanan budidaya, pengembangan perikanan, bidang peternakan dan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang menjadi kewenangan daerah

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan umum kesekretariatan dan Teknis bidang Perikanan, bidang pengembangan perikanan, bidang peternakan dan bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan kesekretariatan dan teknis bidang perikanan, bidang pengembangan perikanan, bidang peternakan dan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan dan teknis bidang perikanan, bidang pengembangan perikanan, bidang peternakan dan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dan teknis bidang perikanan, bidang pengembangan perikanan, bidang peternakan dan

- bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan dan teknis bidang perikanan, bidang pengembangan perikanan, bidang peternakan dan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun struktur organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub bagian Perencanaan;
 - 2. Sub bagian Keuangan;
 - 3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari:
 - 1. Seksi Budidaya dan Kelembagaan
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana dan Kesehatan Ikan
- d. Bidang Pengembangan Perikanan terdiri dari:
 - 1. Seksi Perikanan Perairan Umum ;
 - 2. Seksi Pengembangan Daya Saing ;
- e. Bidang Peternakan:
 - 1. Seksi Produksi dan Pakan Ternak :
 - 2. Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan;
- f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner:
 - 1. Seksi Kesehatan Hewan;
 - 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara umum jenis pelayanan yang diberikan Dinas Perikanan dan Peternakan adalah informasi dan pemikiran strategis terkait teknis pembangunan dan kebijakan dibidang perikanan dan peternakan yang meliputi:

1. Peningkatan Produksi Perikanan;
2. Peningkatan produksi Peternakan;

Strategi yang dilakukan dalam mencapai tujuan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan yaitu:

1. Peningkatan produktivitas perikanan budidaya dengan meningkatkan pengelolaan budidaya dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan;
2. Meningkatkan produksi hasil tangkapan ikan di perairan umum dengan meningkatkan pengelolaan dan pengawasan perikanan tangkap;
3. Peningkatan produktivitas peternakan dengan penyediaan sarana prasarana, penyuluhan dan pengendalian dan penanggulangan penyakit
4. Fasilitasi ijin dan sertifikasi usaha pengolahan pangan

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2021

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran belanja tahun 2021 sebesar Rp 12.791.190.702,- terurai dalam 9 program dan 17 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau meningkat dari tahun 2020, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Tabel T-C 30

Target Indikator Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Tahun sebelumnya

No	Indikator	Target	Realisasi		Capaian	Kenaikan/ Penurunan
			2020	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	1,5%	138-%	287%	212,5%	(149)
2.	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	3 %	166,3 %	213,66%	189,98%	(47,36)

II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINKANNAK233

Isu strategis yang masih perlu mendapatkan penanganan dalam bidang Perikanan dan peternakan di Kabupaten Banyumas tahun 2021 adalah :

- a. Masih belum optimalnya Produksi Perikanan Budidaya
- b. Masih belum optimalnya Produksi Perikanan Tangkap
- c. Masih belum optimalnya produksi peternakan

Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas. Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas peran strategis di bidang Perikanan dan Peternakan, sehingga perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai dan tentu saja anggaran yang memadai guna mendukung tercapainya Tujuan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.

Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan. Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

A. Strength (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang Perikanan, Pengembangan perikanan, peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan pengembangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. SDM Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 87 orang yang didominasi oleh pendidikan S2 dan S1. Dilihat dari pendidikan reguler, pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Banyumas sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam urusan pemerintahan daerah bidang perikanan, pengembangan perikanan, produksi peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
3. Sarana dan Prasarana
Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten

Banyumas sudah cukup memadai, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak.

4. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang Perikanan, pengembangan perikanan, peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan , pengembangan perikanan , peternakan dan kewan kesmavet, kita juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Adanya masalah-masalah terkait dengan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan dan peternakan antara lain:
 - Keterlibatan stakeholders dalam proses penyusunan teknis operasional belum optimal dalam mengkritisi usulan-usulan OPD.
 - Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi kegiatan sebagai bahan perencanaan kegiatan, sehingga perencanaan yang disusun belum bisa simultan dan komprehensif.
 - Masih adanya usulan-usulan kegiatan yang diajukan pada saat dokumen RKPD telah ditetapkan, sehingga kegiatan tersebut tidak tercover dalam dokumen RKPD.

- Tuntutan pelaksanaan Musrenbang yang partisipatif masih belum secara maksimal dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses Musrenbang.

C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang Perikanan, pengembangan perikanan, peternakan dan keswan kesmavet. Peluang-peluang tersebut adalah:

1. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan sehingga semakin leluasa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik;
2. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program;
3. Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan;
4. Komitmen perangkat daerah lain untuk melaksanakan sistem perencanaan dan dukungan database perencanaan dari Perangkat Daerah lain;
5. Adanya dukungan dari eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan;
6. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Banyaknya Lembaga-Lembaga Litbang yang bisa menjadi mitra kerja;
8. Telah disusunnya produk-produk hukum yang memberikan kewenangan dan petunjuk dalam penyusunan proses perencanaan pembangunan.

D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap

proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah.

Ancaman yang mungkin terjadi antara lain:

1. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme pembangunan partisipatif;
2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
3. Perbedaan persepsi tentang mekanisme perencanaan pembangunan antara legislatif dan eksekutif;
4. Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi antar Perangkat Daerah;
5. Kebutuhan perencanaan dan implementasi pembangunan yang komprehensif dan saling terintegrasi;
6. Perubahan peraturan perundangan;
7. Kejadian luar biasa pandemi Covid-19.

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup;
2. Adanya mekanisme teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan bidang perikanan, pengembangan perikanan, peternakan dan kesehatan hewan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Banyumas dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- Kurangnya keterlibatan stakeholders pada proses penyusunan perencanaan pembangunan dalam mengkritisi usulan-usulan OPD.
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan yang terkait dengan dokumen perencanaan
- Pelaksanaan perencanaan tidak tepat waktu karena mekanisme tahapan panjang dan melibatkan banyak pihak dengan peraturan perundangan yang dinamis

- Tuntutan pelaksanaan Musrenbang yang partisipatif masih belum terwujud secara maksimal karena belum sinergisnya kepentingan yang diakomodir

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dan Peternakan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, peternakan dan perikanan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Banyumas tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang telah ditempuh Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas analisis perencanaan umum pembangunan daerah
2. Meningkatkan kesesuaian capaian kinerja OPD terhadap RPJMD
3. Meningkatkan realisasi pelaksanaan kajian strategi daerah
4. Meningkatkan fasilitasi penerapan inovasi daerah
5. Meningkatkan kualitas dan penyebarluasan informasi perencanaan
6. Meningkatkan kualitas analisis perencanaan bidang perikanan
7. Meningkatkan kualitas analisis perencanaan pembangunan peternakan
8. Meningkatkan pelayanan perkantoran
9. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan perangkat daerah

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja

Perangkat Daerah tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah. Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada lampiran tabel C-T.31. Rancangan awal RKPD tahun 2022 menunjukkan Dinas Perikanan dan Peternakan memiliki 9 program dan 15 kegiatan.

Tabel T-C.31
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN DAERAH
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Banyumas

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022						
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana						
			2022				2023		
			APBD KAB		APBD PROV	APBN	TOTAL	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Target	Rp.				Target	Rp.
				14.768.683.531	0	0	14.768.683.531		15.087.136.364
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	1.5	13.063.423.431	0	0	13.063.423.431	1.5	13.836.038.000
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	1.5	125.000.000	0	0	125.000.000	1.5	125.598.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	942.32	75.000.000	0	0	75.000.000	956.46	75.598.000
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah usaha penangkapan ikan yang diawasi	usaha	2	25.000.000	0	0	25.000.000	2	25.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen informasi perikanan tangkap yang disusun	Dokumen	1	25.000.000	0	0	25.000.000	1	25.000.000
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok nelayan yang naik kelas	%	10	50.000.000	0	0	50.000.000	10	50.598.000
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	RTP	26	50.000.000	0	0	50.000.000	26	50.598.000
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Perairan Umum Yang Ter Re Stocking Ikan	%	10	50.000.000	0	0	50.000.000	10	50.000.000
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pokmaswas yang terbentuk	Kelompok	2	50.000.000	0	0	50.000.000	2	50.000.000

Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan yang dibina	Orang	100	50.000.000	0	0	50.000.000	100	50.000.000
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	1.5	12.938.423.431	0	0	12.938.423.431	1.5	13.710.440.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	11261,8	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	11599,65	978.500.000
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang naik kelas	%	5	100.000.000	0	0	100.000.000	5	150.000.000
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah unit usaha pembudidaya ikan yang mendapatkan sertifikat CPIB/CBIB	unit usaha	20	25.000.000	0	0	25.000.000	20	50.000.000
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan	Orang	50	25.000.000	0	0	25.000.000	50	25.000.000
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Jenis teknologi perikanan budidaya yang diujicoba	Jenis	2	50.000.000	0	0	50.000.000	2	75.000.000
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TDPIK yang diterbitkan	berkas	100	25.000.000	0	0	25.000.000	100	25.000.000
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembudidaya ikan yang mengajukan TDPIK	Orang	100	25.000.000	0	0	25.000.000	100	25.000.000
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah dokumen Analisa Usaha Perikanan Budidaya yang disusun	Dokumen	3	975.000.000	0	0	975.000.000	3	803.500.000
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi Perikanan Budidaya yang disusun	Dokumen	1	25.000.000	0	0	25.000.000	1	25.000.000
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan budidaya perikanan yang dibina	kawasan	1	100.000.000	0	0	100.000.000	1	100.000.000
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah benih budidaya air tawar yang diproduksi	Ekor	45700000 0	700.000.000	0	0	700.000.000	46600000 0	628.500.000
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kejadian penyakit terlapor yang ditangani	%	90	50.000.000	0	0	50.000.000	90	50.000.000
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Dokumen Perencanaan lahan untuk budidaya ikan yang disusun	Dokumen	1	50.000.000	0	0	50.000.000	0	-
Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Dokumen Perencanaan pemanfaatan air yang disusun	Dokumen	1	50.000.000	0	0	50.000.000	0	-
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	196.14	75.000.000	0	0	75.000.000	200.06	75.000.000

Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Tanda Daftar Usaha yang diterbitkan	berkas	100	25.000.000	0	0	25.000.000	100	25.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha olahan hasil perikanan yang didata	pelaku usaha	100	25.000.000	0	0	25.000.000	100	25.000.000
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Rekomendasi kelayakan pengolahan hasil perikanan yang dibuat	Dokumen	1	50.000.000	0	0	50.000.000	1	50.000.000
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaku usaha olahan hasil perikanan yang mengajukan ijin	pelaku usaha	10	50.000.000	0	0	50.000.000	10	50.000.000
	Peningkatan angka konsumsi ikan	kg/kapita/tahun	0.10	50.000.000	0	0	50.000.000	0.10	50.000.000
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha olahan hasil perikanan yang difasilitasi	pelaku usaha	1	50.000.000	0	0	50.000.000	1	50.000.000
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang difasilitasi sapras	Kelompok	1	50.000.000	0	0	50.000.000	1	50.000.000
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100.000.000	0	0	100.000.000	100	100.000.000
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	3	100.000.000	0	0	100.000.000	3	100.000.000
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	2	50.000.000	0	0	50.000.000	2	50.000.000
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	50.000.000	0	0	50.000.000	1	50.000.000
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	9.867.148.123	0	0	9.867.148.123	100	10.793.757.000
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	2	9.867.148.123	0	0	9.867.148.123	2	10.793.757.000
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	80	9.761.248.123	0	0	9.761.248.123	80	10.701.769.000
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	14	105.900.000	0	0	105.900.000	14	91.988.000
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	75	672.818.000	0	0	672.818.000	75	637.683.000
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	1	122.818.000	0	0	122.818.000	3	183.510.000

X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	5	122.818.000	0	0	122.818.000	5	83.510.000
X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Jenis	0	-	0	0	-	2	50.000.000
X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	0	-	0	0	-	5	50.000.000
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	3	550.000.000	0	0	550.000.000	4	454.173.000
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	78	98.000.000	0	0	98.000.000	78	99.173.000
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	50.000.000	0	0	50.000.000	10	50.000.000
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	3	402.000.000	0	0	402.000.000	3	255.000.000
X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	0	-	0	0	-	1	50.000.000
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1.073.457.308	0	0	1.073.457.308	100	1.075.500.000
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	2	691.951.708	0	0	691.951.708	2	694.000.000
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	290.516.708	0	0	290.516.708	12	290.000.000
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	100	401.435.000	0	0	401.435.000	100	404.000.000
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	2	381.505.600	0	0	381.505.600	2	381.500.000
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	104.000.000	0	0	104.000.000	12	104.000.000
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	12	277.505.600	0	0	277.505.600	12	277.500.000
	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	3	1.705.260.100	0	0	1.705.260.100	3	1.251.098.364
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Populasi Ternak	%	3	645.000.000	0	0	645.000.000	3	525.000.000
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah penggunaan sarana peternakan (hibah) yang diawasi	Keg	1	100.000.000	0	0	100.000.000	1	100.000.000

Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Sarana dan prasana peternakan yang diberikan	Paket	2	100.000.000	0	0	100.000.000	2	100.000.000
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ternak unggul dalam kawasan	%	10	25.000.000	0	0	25.000.000	10	25.000.000
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah peternak yang melaksanakan recording	Orang	30	25.000.000	0	0	25.000.000	30	25.000.000
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis pakan ternak sesuai SNI	%	50	50.000.000	0	0	50.000.000	50	50.000.000
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah jenis pakan yang diawasi	Jenis	2	50.000.000	0	0	50.000.000	2	50.000.000
Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah pengecer obat hewan yang diawasi	pengecer	0	-	0	0	-	10	25.000.000
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah dokumen pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	Dokumen	0	-	0	0	-	1	25.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi ternak dan HPT unggul yang disusun	Dokumen	1	370.000.000	0	0	370.000.000	1	325.000.000
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah produksi calon bibit ternak yang dihasilkan	Ekor	16	300.000.000	0	0	300.000.000	21	300.000.000
Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah dokumen SKLB yang diterbitkan	Dokumen	40	25.000.000	0	0	25.000.000	40	25.000.000
Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah kelompok ternak yang dibina	Kelompok	5	45.000.000	0	0	45.000.000	0	-
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Kelompok yang diberikan hibah	Kelompok	1	100.000.000	0	0	100.000.000	0	-
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah kelompok yang menerima bibit ternak	Kelompok	1	100.000.000	0	0	100.000.000	0	-
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase kawasan ternak yang dikelola	%	20	587.559.100	0	0	587.559.100	20	225.000.000
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah jenis pembangunan Infrastruktur di bidang pertanian yang dilaksanakan	Jenis	2	537.559.100	0	0	537.559.100	2	175.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Pembangunan / Rehabilitasi RPH yang dilaksanakan	Unit	3	230.000.000	0	0	230.000.000	1	75.000.000

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana Peternakan yang dilaksanakan	Unit	2	307.559.100	0	0	307.559.100	1	100.000.000
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kawasan sumber bibit ternak yang dibina	kawasan	1	50.000.000	0	0	50.000.000	1	50.000.000
Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah kelompok perbibitan dalam kawasan yang difasilitasi prasarana	Kelompok	4	50.000.000	0	0	50.000.000	4	50.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dokumen Peta sebaran penyakit hewan	Dokumen	1	422.701.000	0	0	422.701.000	1	426.098.364
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan angka kejadian penyakit hewan	%	10	125.000.000	0	0	125.000.000	10	125.500.000
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah ternak yang diobati	Ekor	350	50.000.000	0	0	50.000.000	350	50.500.000
Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak yang divaksin	Ekor	100150	50.000.000	0	0	50.000.000	100150	50.000.000
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah disinfeksi yang dilaksanakan	Keg	48	25.000.000	0	0	25.000.000	48	25.000.000
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD) yang diterbitkan	berkas	1000	35.000.000	0	0	35.000.000	1016	50.000.000
Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah hewan yang diperiksa	Ekor	1000	35.000.000	0	0	35.000.000	1000	35.000.000
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang diawasi	Unit	0	-	0	0	-	16	15.000.000
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kejadian penyakit hewan terlapor yang ditangani	%	100	50.000.000	0	0	50.000.000	100	57.598.364
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah kejadian penyakit hewan yang ditangani	Kasus	4500	50.000.000	0	0	50.000.000	4500	57.598.364
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang mengajukan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Unit	2	125.000.000	0	0	125.000.000	2	126.000.000
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang difasilitasi sapsras	Unit	1	50.000.000	0	0	50.000.000	1	50.500.000
Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Dokumen Pengajuan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang diverifikasi	Dokumen	2	50.000.000	0	0	50.000.000	2	50.500.000
Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel produk hewan yang diuji	sample	25	25.000.000	0	0	25.000.000	25	25.000.000

Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Daging Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) yang dihasilkan	Kg	400000	87.701.000	0	0	87.701.000	400000	67.000.000
Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah RPH yang difasilitasi sarpras	Unit	6	87.701.000	0	0	87.701.000	6	67.000.000
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha peternakan yang berizin	%	1	50.000.000	0	0	50.000.000	1	75.000.000
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomtek yang diterbitkan	rekomendasi	1	50.000.000	0	0	50.000.000	1	50.000.000
Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin	pelaku usaha	10	50.000.000	0	0	50.000.000	10	50.000.000
Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Prosentase usaha pengecer obat hewan yang berizin	%	0	-	0	0	-	1	25.000.000
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang diawasi	ijin	0	-	0	0	-	27	25.000.000

Purwokerto, 2021
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Ir.SULISTIONO, M.Si
NIP. 19680228 199403 1 004

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kab. Banyumas mengakomodir usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga lainnya yang langsung ditujukan kepada Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kab. Banyumas maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dapat dilihat pada tabel C-T.32:

Tabel T-C.32
Usulan Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Dinas Perikanan dan Peternakan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah unit usaha pembudidaya ikan yang mendapatkan sertifikat CPIB/CBIB	Desa Cikawung, cibangkong Pekuncen	1 paket	Budidaya ikan Rp 200.000.000
2	Program PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Sarana dan prasana peternakan yang diberikan	Desa Pengadegan Wangon	1 paket	Pengadaan Kambing Rp 24.000.000
3	Program PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah produksi calon bibit ternak yang dihasilkan	Desa Karanggintung kec. Sumbang Kec. Banyumas	1 paket 1 paket	Rp. 100.000.000 Rp. 50.000.000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Prioritas pembangunan daerah tahun 2022 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2022 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Selain itu prioritas pembangunan merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

Tema Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2022 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Dalam Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2022 ada 7 prioritas Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dalam RKP 2022 yang mana kebijakannya diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022 ditujukan pada "**Peningkatan perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia**", dengan prioritas daerah diarahkan pada:

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pematapan ketahanan bencana
2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing
4. Pematapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sesuai RPJMD tahun 2018-2023 mempertimbangkan isu pembangunan global, nasional dan isu strategis pembangunan daerah, maka Prioritas Daerah dirumuskan untuk memberikan panduan dan penekanan agar kebijakan-kebijakan yang dirumuskan mampu membawa kearah yang tepat, optimal dan sinergi satu sama lain, sehingga semua program dan kegiatan yang dirumuskan dapat menghasilkan output dan capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk **Peningkatan ekonomi dengan penguatan daya saing ekonomi dan SDM** dengan mempertimbangkan prioritas nasional, maka Kabupaten Banyumas melakukan penyesuaian prioritas Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

- 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup
- 2 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

- 3 Peningkatan kualitas infrastruktur untuk memperkuat daya saing daerah
- 4 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia
- 5 Pengembangan smart government dalam peningkatan kualitas pelayanan publik

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINKANNAK

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang melaksanakan pembangunan bidang Perikanan dan Peternakan di Kab. Banyumas, membantu Bupati Banyumas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perikanan dan peternakan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk perikanan dan peternakan. Rencana pembangunan disesuaikan dengan visi misi RPJMD 2018-2023. **"Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri"**

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Misi yang terkait dan menjadi focus kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas yaitu: ***Misi 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.***

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kab. Banyumas Tahun 2022 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Banyumas tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN
Meningkatnya produksi perikanan dan peternakan	Meningkatnya Produksi perikanan budidaya
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap
	Meningkatnya produksi peternakan

III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai dinas yang melaksanakan pembangunan bidang perikanan dan peternakan di Kab. Banyumas menyusun perencanaan sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan dalam rangka mendukung Bupati Banyumas dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan.

Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai 9 program dan 30 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh empat bidang dan sekretariat. Berikut merupakan total kebutuhan dana tahun 2022 yaitu Rp 14.768.683.531,00. Berikut lampiran rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 pada table T-C.33:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023
Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Banyumas

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022						
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana						
			2022				2023		
			APBD KAB		APBD PROV	APBN	TOTAL	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target	Rp.				Target	Rp.			
				14.768.683.531	0	0	14.768.683.531		15.087.136.364
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	1.5	13.063.423.431	0	0	13.063.423.431	1.5	13.836.038.000
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	1.5	125.000.000	0	0	125.000.000	1.5	125.598.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	942.32	75.000.000	0	0	75.000.000	956.46	75.598.000
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah usaha penangkapan ikan yang diawasi	usaha	2	25.000.000	0	0	25.000.000	2	25.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen informasi perikanan tangkap yang disusun	Dokumen	1	25.000.000	0	0	25.000.000	1	25.000.000
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok nelayan yang naik kelas	%	10	50.000.000	0	0	50.000.000	10	50.598.000

Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	RTP	26	50.000.000	0	0	50.000.000	26	50.598.000
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Perairan Umum Yang Ter Re Stocking Ikan	%	10	50.000.000	0	0	50.000.000	10	50.000.000
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pokmaswas yang terbentuk	Kelompok	2	50.000.000	0	0	50.000.000	2	50.000.000
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan yang dibina	Orang	100	50.000.000	0	0	50.000.000	100	50.000.000
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	1.5	12.938.423.431	0	0	12.938.423.431	1.5	13.710.440.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	11261,8	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	11599,65	978.500.000
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang naik kelas	%	5	100.000.000	0	0	100.000.000	5	150.000.000
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah unit usaha pembudidaya ikan yang mendapatkan sertifikat CPIB/CBIB	unit usaha	20	25.000.000	0	0	25.000.000	20	50.000.000
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan	Orang	50	25.000.000	0	0	25.000.000	50	25.000.000
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Jenis teknologi perikanan budidaya yang diujicoba	Jenis	2	50.000.000	0	0	50.000.000	2	75.000.000
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TDPIK yang diterbitkan	berkas	100	25.000.000	0	0	25.000.000	100	25.000.000
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembudidaya ikan yang mengajukan TDPIK	Orang	100	25.000.000	0	0	25.000.000	100	25.000.000
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah dokumen Analisa Usaha Perikanan Budidaya yang disusun	Dokumen	3	975.000.000	0	0	975.000.000	3	803.500.000
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi Perikanan Budidaya yang disusun	Dokumen	1	25.000.000	0	0	25.000.000	1	25.000.000
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan budidaya perikanan yang dibina	kawasan	1	100.000.000	0	0	100.000.000	1	100.000.000

Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah benih budidaya air tawar yang diproduksi	Ekor	457000000	700.000.000	0	0	700.000.000	466000000	628.500.000
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kejadian penyakit terlapor yang ditangani	%	90	50.000.000	0	0	50.000.000	90	50.000.000
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Dokumen Perencanaan lahan untuk budidaya ikan yang disusun	Dokumen	1	50.000.000	0	0	50.000.000	0	-
Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Dokumen Perencanaan pemanfaatan air yang disusun	Dokumen	1	50.000.000	0	0	50.000.000	0	-
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	196.14	75.000.000	0	0	75.000.000	200.06	75.000.000
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Tanda Daftar Usaha yang diterbitkan	berkas	100	25.000.000	0	0	25.000.000	100	25.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha olahan hasil perikanan yang didata	pelaku usaha	100	25.000.000	0	0	25.000.000	100	25.000.000
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Rekomendasi kelayakan pengolahan hasil perikanan yang dibuat	Dokumen	1	50.000.000	0	0	50.000.000	1	50.000.000
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaku usaha olahan hasil perikanan yang mengajukan ijin	pelaku usaha	10	50.000.000	0	0	50.000.000	10	50.000.000
	Peningkatan angka konsumsi ikan	kg/kapita/tahun	0.10	50.000.000	0	0	50.000.000	0.10	50.000.000
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha olahan hasil perikanan yang difasilitasi	pelaku usaha	1	50.000.000	0	0	50.000.000	1	50.000.000
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang difasilitasi sapras	Kelompok	1	50.000.000	0	0	50.000.000	1	50.000.000
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100.000.000	0	0	100.000.000	100	100.000.000
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	3	100.000.000	0	0	100.000.000	3	100.000.000

X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	2	50.000.000	0	0	50.000.000	2	50.000.000
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	50.000.000	0	0	50.000.000	1	50.000.000
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	9.867.148.123	0	0	9.867.148.123	100	10.793.757.00 0
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	2	9.867.148.123	0	0	9.867.148.123	2	10.793.757.00 0
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	80	9.761.248.123	0	0	9.761.248.123	80	10.701.769.00 0
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	14	105.900.000	0	0	105.900.000	14	91.988.000
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	75	672.818.000	0	0	672.818.000	75	637.683.000
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	1	122.818.000	0	0	122.818.000	3	183.510.000
X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	5	122.818.000	0	0	122.818.000	5	83.510.000
X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Jenis	0	-	0	0	-	2	50.000.000
X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	0	-	0	0	-	5	50.000.000
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	3	550.000.000	0	0	550.000.000	4	454.173.000
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	78	98.000.000	0	0	98.000.000	78	99.173.000
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	50.000.000	0	0	50.000.000	10	50.000.000
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	3	402.000.000	0	0	402.000.000	3	255.000.000

X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	0	-	0	0	-	1	50.000.000
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1.073.457.308	0	0	1.073.457.308	100	1.075.500.000
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	2	691.951.708	0	0	691.951.708	2	694.000.000
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	290.516.708	0	0	290.516.708	12	290.000.000
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	100	401.435.000	0	0	401.435.000	100	404.000.000
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	2	381.505.600	0	0	381.505.600	2	381.500.000
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	104.000.000	0	0	104.000.000	12	104.000.000
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	12	277.505.600	0	0	277.505.600	12	277.500.000
	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	3	1.705.260.100	0	0	1.705.260.100	3	1.251.098.364
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Populasi Ternak	%	3	645.000.000	0	0	645.000.000	3	525.000.000
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah penggunaan sarana peternakan (hibah) yang diawasi	Keg	1	100.000.000	0	0	100.000.000	1	100.000.000
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Sarana dan prasana peternakan yang diberikan	Paket	2	100.000.000	0	0	100.000.000	2	100.000.000
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ternak unggul dalam kawasan	%	10	25.000.000	0	0	25.000.000	10	25.000.000
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah peternak yang melaksanakan recording	Orang	30	25.000.000	0	0	25.000.000	30	25.000.000
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis pakan ternak sesuai SNI	%	50	50.000.000	0	0	50.000.000	50	50.000.000

Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah jenis pakan yang diawasi	Jenis	2	50.000.000	0	0	50.000.000	2	50.000.000
Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah pengecer obat hewan yang diawasi	pengecer	0	-	0	0	-	10	25.000.000
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah dokumen pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	Dokumen	0	-	0	0	-	1	25.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi ternak dan HPT unggul yang disusun	Dokumen	1	370.000.000	0	0	370.000.000	1	325.000.000
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah produksi calon bibit ternak yang dihasilkan	Ekor	16	300.000.000	0	0	300.000.000	21	300.000.000
Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah dokumen SKLB yang diterbitkan	Dokumen	40	25.000.000	0	0	25.000.000	40	25.000.000
Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah kelompok ternak yang dibina	Kelompok	5	45.000.000	0	0	45.000.000	0	-
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Kelompok yang diberikan hibah	Kelompok	1	100.000.000	0	0	100.000.000	0	-
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah kelompok yang menerima bibit ternak	Kelompok	1	100.000.000	0	0	100.000.000	0	-
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase kawasan ternak yang dikelola	%	20	587.559.100	0	0	587.559.100	20	225.000.000
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah jenis pembangunan Infrastruktur di bidang pertanian yang dilaksanakan	Jenis	2	537.559.100	0	0	537.559.100	2	175.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Pembangunan / Rehabilitasi RPH yang dilaksanakan	Unit	3	230.000.000	0	0	230.000.000	1	75.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana Peternakan yang dilaksanakan	Unit	2	307.559.100	0	0	307.559.100	1	100.000.000
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kawasan sumber bibit ternak yang dibina	kawasan	1	50.000.000	0	0	50.000.000	1	50.000.000
Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah kelompok perbibitan dalam kawasan yang difasilitasi prasarana	Kelompok	4	50.000.000	0	0	50.000.000	4	50.000.000

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dokumen Peta sebaran penyakit hewan	Dokumen	1	422.701.000	0	0	422.701.000	1	426.098.364
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan angka kejadian penyakit hewan	%	10	125.000.000	0	0	125.000.000	10	125.500.000
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah ternak yang diobati	Ekor	350	50.000.000	0	0	50.000.000	350	50.500.000
Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak yang divaksin	Ekor	100150	50.000.000	0	0	50.000.000	100150	50.000.000
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah disinfeksi yang dilaksanakan	Keg	48	25.000.000	0	0	25.000.000	48	25.000.000
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD) yang diterbitkan	berkas	1000	35.000.000	0	0	35.000.000	1016	50.000.000
Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah hewan yang diperiksa	Ekor	1000	35.000.000	0	0	35.000.000	1000	35.000.000
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang diawasi	Unit	0	-	0	0	-	16	15.000.000
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kejadian penyakit hewan terlapor yang ditangani	%	100	50.000.000	0	0	50.000.000	100	57.598.364
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah kejadian penyakit hewan yang ditangani	Kasus	4500	50.000.000	0	0	50.000.000	4500	57.598.364
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang mengajukan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Unit	2	125.000.000	0	0	125.000.000	2	126.000.000
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang difasilitasi sapras	Unit	1	50.000.000	0	0	50.000.000	1	50.500.000
Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Dokumen Pengajuan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang diverifikasi	Dokumen	2	50.000.000	0	0	50.000.000	2	50.500.000
Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel produk hewan yang diuji	sample	25	25.000.000	0	0	25.000.000	25	25.000.000

Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Daging Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) yang dihasilkan	Kg	400000	87.701.000	0	0	87.701.000	400000	67.000.000
Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah RPH yang difasilitasi sarpras	Unit	6	87.701.000	0	0	87.701.000	6	67.000.000
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha peternakan yang berizin	%	1	50.000.000	0	0	50.000.000	1	75.000.000
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomtek yang diterbitkan	rekomendasi	1	50.000.000	0	0	50.000.000	1	50.000.000
Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin	pelaku usaha	10	50.000.000	0	0	50.000.000	10	50.000.000
Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Prosentase usaha pengecer obat hewan yang berizin	%	0	-	0	0	-	1	25.000.000
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang diawasi	ijin	0	-	0	0	-	27	25.000.000

Purwokerto, 2021
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Ir. SULISTIONO, M.Si
NIP. 19680228 199403 1 004

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 ditunjukkan pada lampiran matrik renja yang telah disesuaikan dengan Renstra Perubahan 2018-2023 sebagai berikut:

**Matrik Tahun 2022 berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Kabupaten Banyumas**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2022				
			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana				
			2022				
			APBD KAB		APBD PROV	APBN	TOTAL
			Target	Rp.			
				14.768.683.531	0	0	14.768.683.531
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	1.5	13.063.423.431	0	0	13.063.423.431
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	1.5	125.000.000	0	0	125.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	942.32	75.000.000	0	0	75.000.000
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah usaha penangkapan ikan yang diawasi	usaha	2	25.000.000	0	0	25.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen informasi perikanan tangkap yang disusun	Dokumen	1	25.000.000	0	0	25.000.000
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok nelayan yang naik kelas	%	10	50.000.000	0	0	50.000.000
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	RTP	26	50.000.000	0	0	50.000.000
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Perairan Umum Yang Ter Re Stocking Ikan	%	10	50.000.000	0	0	50.000.000
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pokmaswas yang terbentuk	Kelompok	2	50.000.000	0	0	50.000.000

Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan yang dibina	Orang	100	50.000.000	0	0	50.000.000
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	1.5	12.938.423.431	0	0	12.938.423.431
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	11261,8	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang naik kelas	%	5	100.000.000	0	0	100.000.000
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah unit usaha pembudidaya ikan yang mendapatkan sertifikat CPIB/CBIB	unit usaha	20	25.000.000	0	0	25.000.000
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan	Orang	50	25.000.000	0	0	25.000.000
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Jenis teknologi perikanan budidaya yang diujicoba	Jenis	2	50.000.000	0	0	50.000.000
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TDPIK yang diterbitkan	berkas	100	25.000.000	0	0	25.000.000
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembudidaya ikan yang mengajukan TDPIK	Orang	100	25.000.000	0	0	25.000.000
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah dokumen Analisa Usaha Perikanan Budidaya yang disusun	Dokumen	3	975.000.000	0	0	975.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi Perikanan Budidaya yang disusun	Dokumen	1	25.000.000	0	0	25.000.000
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan budidaya perikanan yang dibina	kawasan	1	100.000.000	0	0	100.000.000
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah benih budidaya air tawar yang diproduksi	Ekor	457000000	700.000.000	0	0	700.000.000
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kejadian penyakit terlapor yang ditangani	%	90	50.000.000	0	0	50.000.000
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Dokumen Perencanaan lahan untuk budidaya ikan yang disusun	Dokumen	1	50.000.000	0	0	50.000.000
Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Dokumen Perencanaan pemanfaatan air yang disusun	Dokumen	1	50.000.000	0	0	50.000.000

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	196.14	75.000.000	0	0	75.000.000
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Tanda Daftar Usaha yang diterbitkan	berkas	100	25.000.000	0	0	25.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha olahan hasil perikanan yang didata	pelaku usaha	100	25.000.000	0	0	25.000.000
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Rekomendasi kelayakan pengolahan hasil perikanan yang dibuat	Dokumen	1	50.000.000	0	0	50.000.000
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaku usaha olahan hasil perikanan yang mengajukan ijin	pelaku usaha	10	50.000.000	0	0	50.000.000
	Peningkatan angka konsumsi ikan	kg/kapita/tahun	0.10	50.000.000	0	0	50.000.000
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha olahan hasil perikanan yang difasilitasi	pelaku usaha	1	50.000.000	0	0	50.000.000
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang difasilitasi sapsras	Kelompok	1	50.000.000	0	0	50.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100.000.000	0	0	100.000.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	3	100.000.000	0	0	100.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	2	50.000.000	0	0	50.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	50.000.000	0	0	50.000.000
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	9.867.148.123	0	0	9.867.148.123
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	2	9.867.148.123	0	0	9.867.148.123
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	80	9.761.248.123	0	0	9.761.248.123
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	14	105.900.000	0	0	105.900.000

	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	75	672.818.000	0	0	672.818.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	1	122.818.000	0	0	122.818.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	5	122.818.000	0	0	122.818.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	3	550.000.000	0	0	550.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	78	98.000.000	0	0	98.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	50.000.000	0	0	50.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	3	402.000.000	0	0	402.000.000
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1.073.457.308	0	0	1.073.457.308
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	2	691.951.708	0	0	691.951.708
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	290.516.708	0	0	290.516.708
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	100	401.435.000	0	0	401.435.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	2	381.505.600	0	0	381.505.600
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	104.000.000	0	0	104.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	12	277.505.600	0	0	277.505.600
	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	3	1.705.260.100	0	0	1.705.260.100
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Populasi Ternak	%	3	645.000.000	0	0	645.000.000
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah penggunaan sarana peternakan (hibah) yang diawasi	Keg	1	100.000.000	0	0	100.000.000
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Sarana dan prasana peternakan yang diberikan	Paket	2	100.000.000	0	0	100.000.000
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ternak unggul dalam kawasan	%	10	25.000.000	0	0	25.000.000

Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah peternak yang melaksanakan recording	Orang	30	25.000.000	0	0	25.000.000
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis pakan ternak sesuai SNI	%	50	50.000.000	0	0	50.000.000
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah jenis pakan yang diawasi	Jenis	2	50.000.000	0	0	50.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi ternak dan HPT unggul yang disusun	Dokumen	1	370.000.000	0	0	370.000.000
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah produksi calon bibit ternak yang dihasilkan	Ekor	16	300.000.000	0	0	300.000.000
Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah dokumen SKLB yang diterbitkan	Dokumen	40	25.000.000	0	0	25.000.000
Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah kelompok ternak yang dibina	Kelompok	5	45.000.000	0	0	45.000.000
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Kelompok yang diberikan hibah	Kelompok	1	100.000.000	0	0	100.000.000
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah kelompok yang menerima bibit ternak	Kelompok	1	100.000.000	0	0	100.000.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase kawasan ternak yang dikelola	%	20	587.559.100	0	0	587.559.100
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah jenis pembangunan Infrastruktur di bidang pertanian yang dilaksanakan	Jenis	2	537.559.100	0	0	537.559.100
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Pembangunan / Rehabilitasi RPH yang dilaksanakan	Unit	3	230.000.000	0	0	230.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana Peternakan yang dilaksanakan	Unit	2	307.559.100	0	0	307.559.100
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kawasan sumber bibit ternak yang dibina	kawasan	1	50.000.000	0	0	50.000.000
Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah kelompok perbibitan dalam kawasan yang difasilitasi prasarana	Kelompok	4	50.000.000	0	0	50.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dokumen Peta sebaran penyakit hewan	Dokumen	1	422.701.000	0	0	422.701.000
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan angka kejadian penyakit hewan	%	10	125.000.000	0	0	125.000.000

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah ternak yang diobati	Ekor	350	50.000.000	0	0	50.000.000
Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak yang divaksin	Ekor	100150	50.000.000	0	0	50.000.000
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah disinfeksi yang dilaksanakan	Keg	48	25.000.000	0	0	25.000.000
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD) yang diterbitkan	berkas	1000	35.000.000	0	0	35.000.000
Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah hewan yang diperiksa	Ekor	1000	35.000.000	0	0	35.000.000
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kejadian penyakit hewan terlapor yang ditangani	%	100	50.000.000	0	0	50.000.000
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah kejadian penyakit hewan yang ditangani	Kasus	4500	50.000.000	0	0	50.000.000
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang mengajukan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Unit	2	125.000.000	0	0	125.000.000
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang difasilitasi sapsras	Unit	1	50.000.000	0	0	50.000.000
Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Dokumen Pengajuan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang diverifikasi	Dokumen	2	50.000.000	0	0	50.000.000
Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel produk hewan yang diuji	sample	25	25.000.000	0	0	25.000.000
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Daging Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) yang dihasilkan	Kg	400000	87.701.000	0	0	87.701.000
Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah RPH yang difasilitasi sarpras	Unit	6	87.701.000	0	0	87.701.000
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha peternakan yang berizin	%	1	50.000.000	0	0	50.000.000

Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomtek yang diterbitkan	rekomendasi	1	50.000.000	0	0	50.000.000
Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin	pelaku usaha	10	50.000.000	0	0	50.000.000

Purwokerto, 2021
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Ir.SULISTIONO, M.Si
NIP. 19680228 199403 1 004

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2022. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas tahun 2022, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2022 dan Rencana Strategis Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra Perubahan-OPD) Tahun 2018-2023 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Propinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. Dinas Perikanan dan Peternakan dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Kabupaten Banyumas Tahun 2022 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **“Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**.

KEPALA DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS



L. SULISTIONO, M.Si
NIP. 19630228 199403 1 004